

# SENATOR



ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 16-30 SEPTEMBER 2024



## ■ Nusantara

DPD RI Sahkan Tata Tertib:  
Pemilihan Pimpinan  
Akan Gunakan  
Sistem Paket

## ■ Kuliner

Empat Kuliner Paling  
Dicari di Tangerang,  
Banten  
*Four Most Sought-After  
Culinary Delights  
in Tangerang, Banten*

# DPD RI akan Awasi Pilkada Serentak 2024



**Sidang Paripurna DPD RI Sahkan  
Pertimbangan RAPBN TA 2025**

SCAN  
ME!

Akses  
MAJALAH SENATOR  
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia



**SENAT UTAMA**

04



- DPD RI akan Awasi Pilkada Serentak 2024
- Penyelenggara Negara Harus Netral
- Waspada! Bansos Bermuatan Politis
- Fenomena Calon Tunggal Vs Kotak Kosong
- Komite I Cek Persiapan Pilkada di Bali

**NUSANTARA**

11

- DPD RI Sahkan Tata Tertib:  
Pemilihan Pimpinan Akan Gunakan Sistem Paket
- LaNyalla Tetap Komit  
Perjuangkan Eksistensi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara
- Senator Merasa Gerah Nakes Dilarang Berjibab
- Disaksikan LaNyalla, Nono dan OSO:  
Daud Yordan Pertahankan Gelar Juara Dunia
- Kasus Perundungan Harus Jadi Perhatian Pemerintah

**VARIA SENAT**

17

- Sidang Paripurna DPD RI Sahkan  
Pertimbangan RAPBN TA 2025
- Komite IV DPD RI Bahas Strategi  
APBN 2024 dan RAPBN 2025
- BI Sampaikan Proyeksi Ekonomi  
dan Pembangunan 2025
- Senator Apresiasi Pemaparan  
APBN 2024 dan RAPBN 2025

- Kemiskinan dan Pengangguran  
Tetap Jadi Perhatian Utama
- Meresahkan, Lonjakan Kasus Kekerasan  
Terhadap Perempuan
- Perlu Langkah Tegas Atasi Kekerasan Terhadap  
Perempuan dan Anak

**SEKRETARIAT JENDERAL**

25

- Mahasiswa Unand Kunjungi Kantor DPD RI Sumbar
- Setjen DPD RI Gelar FKP Standar Pelayanan IT

**GALERI FOTO**

27



**GAGASAN**

28

- Pengawasan Dana Desa untuk  
Transformasi Ekonomi di Kaltara

**KULINER**

30

- Empat Kuliner Paling Dicari di Tangerang, Banten  
*Four Most-Sought-After Cuisines in Tangerang, Banten*





## Pilkada Serentak dan Peran Pengawasan DPD RI

DPD RI berkomitmen untuk mengawal Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung di seluruh Indonesia, mencakup 38 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Komitmen ini merupakan bagian dari tanggung jawab DPD RI sebagai wakil daerah dalam menjaga kepentingan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Mengingat pilkada adalah salah satu momen penting dalam demokrasi lokal, pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk DPD RI, sangat diperlukan guna memastikan proses pemilihan berjalan dengan adil dan demokratis.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam Pilkada Serentak 2024 adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh calon petahana (*incumbent*). Masih adanya petahana yang menjabat hingga menjelang pilkada meningkatkan risiko mereka menggunakan program-program pemerintah, seperti bantuan sosial, untuk meraih simpati politik. DPD RI dapat berperan dengan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperketat regulasi penggunaan anggaran negara selama masa kampanye serta memperhatikan indikasi kecurangan yang menguntungkan calon tertentu.

Fenomena kotak kosong juga menjadi isu penting yang perlu diawasi. Dalam beberapa pilkada, calon tunggal yang melawan kotak kosong menunjukkan lemahnya demokrasi lokal karena minimnya kontestasi politik yang sehat. DPD RI mencoba berperan dalam menyoroti daerah-daerah yang mengalami fenomena ini dan mendorong upaya yang lebih baik untuk menjamin kompetisi politik yang lebih terbuka dan inklusif, serta memastikan bahwa pilihan rakyat benar-benar dihargai dalam proses demokrasi.

(\* / Pimred)

## *Simultaneous Regional Elections and Supervisory Role of House of Regional Representative (DPD) RI*

*DPD RI commits to escort simultaneous regional elections 2024 held all over Indonesia, covering 38 provinces and 508 regencies/cities. The commitment is a form of responsibilities of DPD RI as regional representative in order to safeguard the community interests in every corner of the country. Considering that regional election is one of the important moments in local democracy, close supervision by various parties, including DPD RI, is very much needed to ensure the voting process runs justly and democratically.*

*One of the challenges faced in simultaneous regional elections 2024 is potential power abuse by incumbent candidates. The very existence of incumbents right up to the voting date increases the risk that they utilise government programs such as social aids to gain political sympathy. DPD RI can assume the role by encouraging the central and regional governments to tighten regulations related to budget utilization during campaign season as well as to closely monitor fraudulent indication that tends to benefit certain candidates.*

*Empty box phenomenon is likewise an important issue to be monitored. In several regional elections, a single candidate running against an empty box indicates vulnerable local democracy due to lack of healthy political contests. DPD RI attempts to play its role by spotlighting regions which are enduring such phenomena and encouraging better endeavour to secure a more openly and inclusively political contests, as well as ascertaining people's votes to be highly valued within democracy process. (\* / Chief Editor)*

# DPD RI akan Awasi Pilkada Serentak 2024

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, melalui Komite I, resmi mengawasi dan mengawal tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang. Pilkada ini akan dilaksanakan di 37 provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta di 508 kabupaten/kota untuk pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan B Najamudin saat memimpin sidang paripurna tanggal 12 Juli 2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**W**akil Ketua DPD RI, Nono Sampono, dalam Sidang Paripurna DPD RI, me-

negaskan bahwa Pilkada Serentak 2024 merupakan hajatan besar yang harus berlangsung damai, aman,

dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil. “Setelah pemilihan presiden, wakil presiden,



**27** NOVEMBER  
**2024**



**PILKADA**  
**SERENTAK**

Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. (Foto Antara)

serta anggota legislatif, kita sekarang dihadapkan pada Pilkada Serentak terbesar dalam sejarah Indonesia,” kata Nono saat memimpin Sidang Paripurna DPD RI di Jakarta baru-baru ini,

Komite I DPD RI diberi tugas khusus untuk mengawasi peran pemerintah daerah dan seluruh tahapan Pilkada. Nono juga menambahkan bahwa koordinasi dengan lembaga terkait sangat penting

untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari Sidang Paripurna, Komite I telah melakukan berbagai kegiatan pengawasan, termasuk rapat kerja dengan mitra kerja dan kunjungan ke daerah. Baru-baru ini, Komite I menggelar rapat dengan petinggi Mabes TNI untuk membahas potensi kerawanan Pilkada serta melakukan kunjungan kerja ke

Bali guna memantau persiapan Pilkada di provinsi tersebut.

Selama kunjungan ke Bali, Anggota Komite I, seperti Ahmad Kanedi, Aji Padindang, dan Hilmy Muhammad, mengingatkan akan bahaya politik uang yang menjalar ke penyelenggara Pilkada. Mereka menekankan pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan internal di KPU dan Bawaslu. (\*)

# Penyelenggara Negara Harus Netral

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari pemilihan Sumatera Utara (Sumut) Dedi Iskandar Batubara mengingatkan para penyelenggara negara untuk bersikap netral pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang.



Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara (Foto Biro Setjen DPD RI)

Sebagai Anggota DPD RI dari Sumatera Utara, Dedi Iskandar memberikan perhatian khusus dalam pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di provinsi tersebut. Sebab, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara itu mendapat perhatian publik. Selain berpenduduk terpadat di luar Jawa, juga calon yang maju adalah Bobby Nasution, yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena itu, Dedi Iskandar kepada media di Medan, Kamis (12/9/2024), mengingatkan kepada pemerintah, khususnya di Sumatera Utara, termasuk Pj Gubernur Sumut, Pj Bupati dan Wali Kota serta seluruh aparat penegak hukum, Aparatur Sipil Negara

(ASN), untuk tetap memposisikan diri sebagai abdi Negara yang bersikap netral di pilkada.

“Jangan menggunakan jabatan ke pasangan tertentu, apalagi mengumpulkan orang untuk mempengaruhi kepada pasangan tertentu, serta membagikan sesuatu atas nama negara dan atas nama pemerintah, apakah bantuan sosial, bagi-bagi beras dan bantuan lainnya untuk misi terselubung kemenangan pasangan tertentu di pilkada. Saya berharap pada Pj Gubernur dan Pj Bupati, walikota se Sumut bersikap netral jangan karena kebijakan yang dibuat memunculkan keresahan di tengah masyarakat,” paparnya.

Kepada penyelenggara pilkada, yaitu Komisi Pe-

milihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Al Washliyah Sumut itu mengharapkan untuk berlaku adil kepada semua calon. Dirinya meminta semua peserta pemilu diperlakukan dengan posisi yang sama, termasuk adanya teguran dari Bawaslu jika terdapat pelanggaran yang dilakukan.

“Perlakukan semua peserta pilkada dengan posisi yang sama. Sosialisasikan para calon sebaik mungkin dengan porsi yang sama, dan jangan ada upaya yang kemudian mengarahkan pada pasangan tertentu. Kalau ada pelanggaran diingatkan oleh Bawaslu sebagai pengawas,” katanya.

Kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, Dedi Iskandar mengimbau untuk sama-sama menyuk-



# NETRALITAS ASN MENJAMIN BIROKRASI KUAT

Seorang ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak pada kepentingan siapa pun. Birokrasi pemerintahan akan kuat jika para ASN bersikap netral dari segala kepentingan.

Netralitas ASN bermanfaat untuk pelayanan publik!



## Apa itu Netralitas ASN?

Netralitas ASN mengandung makna *impartiality*, yaitu **bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif dan tidak memihak.**

## Mengapa ASN Harus Netral?

Hal ini untuk memastikan **kualitas pelaksanaan birokrasi, pelayanan publik/masyarakat tetap terjaga, meski terjadi pergantian kepemimpinan.**

seskan pilkada, baik pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan

wakil bupati, dan calon wali kota dan wakil wali kota. Dia juga optimis pilkada berlangsung demokratis

bersih dan kredibel karena penyelenggara sudah berpengalaman dari waktu ke waktu. (\*)



# Waspadai Bansos Bermuatan Politis

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, mengkritik penyaluran bantuan sosial (bansos) yang cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.



Ilustrasi Bansos jelang Pilkada Serentak 2024. (Foto Koran Tempo)

Menurutnya, bansos yang diberikan kerap bermuatan politis dan bukan semata untuk perlindungan sosial. Teras Narang, yang juga mantan Gubernur Kalteng, mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap bantuan yang diberikan jelang Pilkada. “Waspada dengan cara mereka yang membagi-bagikan bantuan sosial, terutama jika menggunakan fasilitas keuangan daerah atau negara. Pemilih cerdas harus jeli melihat asal-usul bansos yang diduga berasal dari uang rakyat sendiri,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat dari Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan

tidak ada pelanggaran dalam penggunaan bansos yang berpotensi menguntungkan calon tertentu. Teras Narang menambahkan bahwa calon kepala daerah harus mengandalkan kemampuan dan kualitas mereka sendiri, bukan dengan memanfaatkan kekuasaan atau membagikan bantuan secara tidak

etis.

Teras Narang juga meng-

ingatkan pentingnya mempertahankan semangat Huma Betang—kebersamaan dan keberagaman—dalam pelaksanaan Pilkada di Kalimantan Tengah. Ia menekankan bahwa semangat ini harus terus dijaga oleh pemimpin yang terpilih, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Lebih lanjut, ia berharap Pilkada kali ini tidak menjadi ajang perang narasi yang memecah belah masyarakat. “Mari bersama-sama sukseskan pilkada tanpa perpecahan, dan lahirkan pemimpin amanah yang mampu memajukan daerah serta merangkul semua elemen,” tutupnya.

**Anggota DPD RI Agustin Teras Narang.**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

(\*)



# Fenomena Calon Tunggal Vs Kotak Kosong

Pada pilkada yang akan digelar pada 27 November mendatang, terdapat 41 daerah yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Ini sangat memprihatinkan.

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan keprihatinannya terkait fenomena calon tunggal melawan kotak kosong dalam Pilkada Serentak 2024. Pada pilkada yang akan digelar 27 November mendatang, terdapat 41 daerah yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Jimly menyatakan bahwa fenomena ini seharusnya tidak terjadi jika mekanisme calon independen dimanfaatkan dengan baik.

Menurut Jimly, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan pada tahun 2005 yang membuka peluang bagi calon independen untuk maju dalam pilkada, guna mencegah dominasi partai politik. “Kita sudah buat putusan di MK tahun 2005 untuk menasionalisasi aturan calon independen. Ini



dimaksudkan agar pilkada tidak didominasi partai, sehingga ada alternatif calon independen,” ujarnya kepada wartawan.

Jimly juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap persyaratan calon independen yang saat ini dianggap sulit dipenuhi. Ia mengusulkan agar pendaftaran calon inde-

penden didahulukan sebelum usulan partai politik, sehingga dapat menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya fenomena kotak kosong.

Lebih lanjut, Jimly mengingatkan bahwa kemenangan kotak kosong dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti penggantian oleh pejabat sementara. Menurutnya, solusi terbaik adalah KPU menggelar pemilihan ulang dengan membuka kembali pendaftaran calon. “Pemilihan ulang harus melibatkan pendaftaran baru, memberikan kesempatan bagi tokoh lain termasuk calon independen,” tegasnya.

Jimly berharap evaluasi ini dapat mencegah terulangnya calon tunggal melawan kotak kosong pada pilkada mendatang, sehingga proses demokrasi berjalan lebih adil dan kompetitif.(\*)



**Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie.**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# Komite I Cek Persiapan Pilkada di Bali

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Selasa (10/9/2024).



Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Kunjungan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan pelaksanaan pilkada, khususnya terkait anggaran dari APBD dan potensi masalah calon tunggal melawan kotak kosong, sesuai dengan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni, yang memimpin kunjungan tersebut, memberikan perhatian khusus pada anggaran penyelenggaraan pilkada, potensi kerawanan, dan langkah pencegahan politik uang. “Diharapkan sosialisasi yang masif dapat mencegah *money politic*, dan validasi data pemilih serta deklarasi damai dapat meredam potensi konflik di daerah,” kata Sylviana.

Rombongan Komite I DPD RI yang melakukan kunjungan kerja ke Bali, melaporkan bahwa anggaran Pilkada sudah siap sepenuhnya melalui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Anggaran untuk KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri telah diberikan

100 persen. KPU Bali menargetkan partisipasi pemilih di atas 75 persen dan *zero* sengketa dalam Pilkada mendatang.

Selain itu, KPU Bali menerapkan kebijakan khusus dengan membentuk TPS yang sepenuhnya dikelola oleh perempuan, termasuk saksi dan petugas keamanan. Data pemilih juga sedang diperbarui berdasarkan data dari Kemendagri terkait pindah domisili dan faktor lainnya.

Bawaslu Bali menambahkan bahwa seluruh anggarannya telah tersedia, dan aparatur pengawas pemilu, hingga ke tingkat TPS, telah difasilitasi dengan baik. Bawaslu juga melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis untuk memastikan pengawasan berjalan optimal dengan total 12.809 pengawas di seluruh Bali. (\*)



Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni menerima cinderamata dari Wakil Ketua KPU Bali setelah kedua belah pihak mengadakan dialog tentang kesiapan Bali melaksanakan Pilkada Serentak 2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**DPD RI Sahkan Tata Tertib:**

# Pemilihan Pimpinan Akan Gunakan Sistem Paket

Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-5 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 akhirnya mengesahkan Peraturan Tata Tertib DPD RI hasil harmonisasi Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dengan beberapa catatan.



Usai mengadakan Sidang Paripurna Luar Biasa, pimpinan dan anggota DPD RI mengadakan sesi foto bersama di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**S**idang tersebut dipimpin oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dan Wakil

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Rabu (4/9/2024) di Gedung Nusantara V, Kompleks

Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Tatib hasil harmonisasi disahkan,



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberikan keterangan pers usai Sidang Paripurna penetapan sistem paket dalam pemilihan Pimpinan DPD RI periode 2024-2029. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

namun ada beberapa pasal yang akan dibahas kembali oleh pimpinan DPD dan pimpinan PPUU,” ujar Nono Sampono.

Salah satu isu penting yang sempat memunculkan perdebatan adalah mengenai pemilihan Pimpinan DPD RI periode 2024-2029.

Ada dua pendapat yang berbeda, yakni pihak AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang menginginkan pe-

milihan dengan sistem paket, sedangkan pihak Sultan B Najamudin tidak menginginkan ada pasal yang mensyaratkan calon pimpinan DPD RI bebas dari sanksi pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik DPD RI.

Setelah adu argumen, para anggota DPD RI sepakat bahwa pemilihan Pimpinan DPD RI akan dilakukan dengan sistem paket. “Ini adalah hasil

keepakatan antara dua pihak yang maju dalam pemilihan. Kami sepakat untuk menggunakan sistem paket,” kata Ketua DPD RI LaNyalla.

Sesuai Pasal 91 Tata Tertib DPD RI, pemilihan pimpinan dilakukan dengan sistem paket yang mencerminkan keterwakilan sub wilayah dan keterwakilan perempuan dari empat sub wilayah yang ada. (\*)



Pimpinan DPD RI kiri ke kanan: Nono Sampono (Wakil Ketua), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua) dan Sultan B Najamudin (Wakil Ketua). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

**LaNyalla Tetap Komit**

# Perjuangkan Eksistensi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara

Terpilih atau tidak sebagai Ketua DPD RI periode 2024-2029, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti akan tetap komit memperjuangkan eksistensi kerajaan dan kesultanan nusantara di masa mendatang.



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menerima Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**K**etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan eksistensi kerajaan dan kesultanan Nusantara. Hal tersebut disampaikannya saat menerima Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) di kediamannya di Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2024).

LaNyalla menyatakan, terlepas dari terpilih kembali atau tidak sebagai Ketua DPD RI periode 2024-2029, ia akan terus bergerak dan berkomitmen memperjuangkan keberadaan kerajaan dan kesultanan di Indonesia. Menurutnya, para raja dan sultan Nusantara berperan besar dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menggabungkan wilayah mereka secara sukarela.

“Sebuah kehormatan bagi saya bisa bersama-sama ber-



Foto bersama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan pengurus Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) di kediaman Ketua DPD RI. (1/9/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

juang dengan para raja dan sultan Nusantara. Semoga menjadi amal jariyah saya sebagai hamba Allah,” ujar LaNyalla yang juga pernah mendapatkan gelar Datuk Yang Dipertuan Junjungan Negeri dari 57 raja dan sultan Nusantara.

Dewan Kehormatan MAKN PYM Edward Syah Pernong dari Kerajaan Adat Kepaksian Sekala Brak Lampung mengungkapkan harapannya agar LaNyalla terpilih kembali sebagai Ketua

DPD RI. Menurutnya, komitmen dan keberanian LaNyalla dalam memperjuangkan kerajaan Nusantara tidak perlu diragukan.

Selain itu, PYM Edward Syah Pernong berharap MAKN dan DPD RI bisa terus melanjutkan sinergitas untuk memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara agar segera disahkan menjadi undang-undang. (\*)

# Senator Merasa Gerah Nakes Dilarang Berjilbab

Belum lepas dari ingatan tentang pelarangan berjilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), kini muncul pelarangan tenaga kesehatan (nakes) menggunakan jilbab di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta.



Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pelarangan penggunaan jilbab bagi tenaga kesehatan (nakes) di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta menuai kecaman dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Kasus ini mencuat setelah sebelumnya terjadi pelarangan serupa pada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17

Agustus 2024.

Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri, menegaskan bahwa pelarangan ini merupakan pengulangan dari kasus yang sama. “Jadi ibarat terperosok di lubang yang sama,” ujar Hasan, Senin (2/9/2024). Komite III, yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), merekomendasikan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia untuk segera mengambil tindakan terhadap rumah sakit yang melarang nakes berjilbab.

Wakil Ketua Komite III Abdul Hakim, menyatakan bahwa larangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama. “Kasus pelarangan berjilbab ini jangan dianggap sepele dan tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dapat mengganggu kenyamanan dan kerukunan beragama,” ujar Hakim. Ia meminta Kemenkes dan

Ombudsman melakukan investigasi mendalam terkait pelanggaran ini.

Senator dari Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Fahira Idris, menilai kebijakan rumah sakit tersebut merupakan bentuk diskriminasi berbasis agama yang tidak dapat ditoleransi. “Ini adalah pelanggaran yang sangat serius, melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan konstitusi kita,” tegas Fahira. Ia mendesak agar investigasi dilakukan secara transparan untuk mencegah kasus serupa di masa depan. (\*)



Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI Fahira Idris (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Disaksikan LaNyalla, Nono dan OSO:

# Daud Yordan Pertahankan Gelar Juara Dunia

Petinju Indonesia Daud Yordan berhasil mempertahankan gelar juara dunia badan tinju IBA kelas ringan super setelah menundukkan petinju asal Argentina, Hernan Leandro Carrizo, di GOR Terpadu Ayani, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (7/9/2024).



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Nono memberikan ucapan selama kepada Daud Yordan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Pertarungan ini disaksikan langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dan mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO).

Daud Yordan, yang akan dilantik sebagai anggota DPD RI setelah memenangkan pemilu legislatif 2024 dengan perolehan suara terbanyak di daerah pemilihan Kalbar, berhasil menang KO di ronde ke sembilan. “Selamat untuk Daud Yordan. Saya hadir langsung bersama Pak Nono dan Pak OSO untuk memberi dukungan kepada adinda Daud Yordan, yang akan segera menjadi teman seperjuangan kami di DPD RI,” kata LaNyalla.

LaNyalla memuji keberhasilan Daud Yordan yang telah mengharumkan nama Indonesia di

dunia internasional. Ia berharap prestasi Yordan di olahraga tinju bisa menular ke karirnya di DPD RI. “Saya yakin Daud Yordan mampu memberi kontribusi berarti bagi daerah dan bangsa ini lewat kiprahnya di DPD RI,” tambah LaNyalla.

Mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang turut menyampaikan kebang-

gaannya. “Perjuangan Daud di dunia olahraga tidak mudah, dan itu membuatnya tangguh. Saya yakin di parlemen nanti, dia akan konsisten memperjuangkan isu-isu penting daerah dan membawa kemajuan bagi masyarakatnya,” ujar OSO. (\*)



# Kasus Perundungan Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Seorang mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Risma Aulia diduga mengalami perundungan oleh seniornya, yang memicu tragedi bunuh diri.



(Foto epapaer MI)

**A**nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie menyoroti maraknya kasus perundungan di lembaga pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, setelah terjadinya kasus bunuh diri seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip), dokter Risma Aulia.

Jimly menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan bahwa perundungan adalah masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintah. “Ini gejala umum, tanggung jawab pemerintah harus menyelesaikan ini,” tegasnya kepada wartawan, Sabtu (7/9/2024).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menekankan

bahwa tindakan perundungan di perguruan tinggi tidak bisa dibiarkan dan harus direspons dengan tegas. Menurutnya, rektor sebagai pemimpin perguruan tinggi memiliki tanggung jawab penuh atas insiden semacam ini, terutama melalui

Pembantu Rektor (Purek) III yang membawahi bidang kemahasiswaan. Jimly juga

menegaskan bahwa jika pelaku perundungan adalah seorang dosen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) harus memberikan sanksi pemberhentian. “Pecat saja supaya ada tindakan. Jangan sampai semuanya harus presiden yang turun tangan,” tegasnya, menekankan pentingnya penegakan aturan di tingkat institusi.

Ia juga menyoroti pentingnya pencegahan perundungan sejak masa orientasi mahasiswa baru (ospek) dan berharap pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perguruan tinggi yang lalai mengatasi kasus perundungan. Kasus bunuh diri dokter Risma pada Senin, 12 Agustus 2024, kembali menyorot masalah ini di kalangan masyarakat.(\*)



**Jimly Asshiddiqie**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



# Sidang Paripurna DPD RI Sahkan Pertimbangan RAPBN TA 2025

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berhasil mengesahkan Pertimbangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.



Suasana Sidang Paripurna Luas Biasa DPD RI untuk mengesahkan Pertimbangan RAPBN TA 2025 di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pengesahan RAPBN itu diputuskan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-5 pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan B Najamudin. “Agenda sidang paripurna luar biasa ini untuk mengesahkan pertimbangan DPD RI atas RAPBN

2025 dan Peraturan DPD RI Tentang Tata Tertib,” ujar LaNyalla saat membuka sidang.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana, melaporkan hasil pembahasan Pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN 2025. “DPD memberikan pertimbangan kepada DPR sesuai Pasal 282 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Fokus kami meliputi makro ekonomi, penerimaan negara, hingga dana transfer ke daerah,” kata Elviana.

Elviana juga menyoroti program ma-

kan bergizi gratis yang harus tetap menjaga alokasi anggaran pendidikan. “Program Makan Bergizi Gratis harus tepat sasaran, namun jangan mengambil porsi anggaran pendidikan yang seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru honorer,” jelasnya.

Dalam sidang tersebut, DPD RI mendesak pemerintah agar alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilakukan dengan lebih adil kepada daerah penghasil sumber daya alam guna menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (\*)

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana menyerahkan laporan kepada Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti tentang pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN TA 2025. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

# Komite IV DPD RI Bahas Strategi APBN 2024 dan RAPBN 2025

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan rapat kerja bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Bank Indonesia di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/9/2024).

Rapat tersebut membahas strategi kebijakan fiskal terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 serta Rancangan APBN (RAPBN) 2025. Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta menekankan pentingnya APBN 2024 sebagai strategi kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang. “Strategi kebijakan fiskal jangka pendek akan fokus pada pengendalian inflasi, penghapusan

kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi,” ujar Novita.

Ia juga menjelaskan bahwa strategi kebijakan jangka menengah dan panjang akan difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, serta reformasi kelembagaan. “Ini semua untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kuat,” tambahnya.



Komite IV DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran untuk mendengarkan paparan realisasi APBN TA 2024 dan RAPBN TA 2025 di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparannya mengenai RAPBN 2025 menyoroti pentingnya transisi efektif menuju APBN yang berkelanjutan. “RAPBN 2025 dirancang untuk mendukung agenda pem-

angunan jangka panjang Indonesia, dengan fokus pada keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Sri Mulyani.

Ia juga menekankan bahwa tantangan ekonomi global pada 2025 diperkirakan tetap tinggi,

namun ekonomi Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh solid dengan kebijakan fiskal yang tepat. “Dengan pertumbuhan yang berkeadilan di berbagai wilayah, kita yakin ekonomi Indonesia akan terus berdaya saling di kancah global,” tegasnya. (\*)

# BI Sampaikan Proyeksi Ekonomi dan Pembangunan 2025

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, memaparkan prospek ekonomi Indonesia pada 2025 dengan proyeksi pertumbuhan solid antara 4,8-5,6%, meskipun risiko pasar keuangan global masih tinggi.

Dalam rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, memaparkan prospek ekonomi Indonesia serta respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. “Meskipun ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda, risiko tetap tinggi. Namun, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh solid antara 4,8-5,6% pada 2025,” kata Destry, Senin (2/9).

Destry menambahkan bahwa surplus neraca perdagangan, aliran investasi asing, serta kecukupan cadangan devisa menjadi faktor utama yang menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. “Bauran kebijakan BI yang *pro-stability* dan *pro-growth* akan terus diperkuat,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Scenaider C.H. Siahaan, yang mewakili Menteri PPN/Kepala



Pimpinan Bank Indonesia ikut memberikan paparan terkait RAPBN TA 2025 di hadapan Komite IV DPD RI dalam rapat kerja di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

## Proyeksi Ekonomi RI Menurut World Bank Hingga 2025

	2022	2023	2024	2025
Real GDP (% change)	5.2	4.8	4.9	5.0
Inflasi (%)	4.2	4.5	3.6	3.4
Fiscal Balance (% of GDP)	-2.7	-2.5	-2.5	-2.4
Utang Pemerintah (% of GDP)	38.8	38.1	37.8	37.7
Current Account Balance (% of GDP)	0.9	-0.1	-0.5	-1.2

Table: Tim Riset IDX Channel (Data Dikhan), Desember 2022 • Source: World Bank • Created with Datawrapper

Bappenas, menyampaikan rencana pembangunan tahun 2025 sebagai langkah awal RPJMN 2025-2029. “Rencana ini menjadi fondasi penting untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045,” kata Scenaider.

Beberapa prioritas termasuk pengendalian penyakit, penurunan stunting, serta pembangunan infrastruktur, dengan daerah seperti Nusa Tenggara Timur

menjadi fokus intervensi kesehatan. Proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi perhatian pemerintah untuk dilanjutkan.

Melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan fokus pada pembangunan yang inklusif, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. (\*)

# Senator Apresiasi Pemaparan APBN 2024 dan RAPBN 2025

Sejumlah senator memberikan apresiasi atas pemaparan APBN 2024 dan Rancangan APBN 2025 yang disampaikan dalam rapat kerja Komite IV DPD RI bersama jajaran Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappenas.



**K**etua Komite IV Amang Syafrudin mengapresiasi kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan, Deputy Senior Bank Indonesia, dan Deputy Pendanaan Bappenas dalam agenda pengawasan APBN dan pembahasan RAPBN.

Elviana, Wakil Ketua Komite IV, menyoroti kondisi ekonomi mikro masyarakat yang belum diperhatikan oleh pemerintah. “Ekonomi mikro masyarakat tidak baik-baik saja, sumber-sumber ekonomi mereka nyaris tidak diperhatikan. Semoga

ini bisa menjadi perhatian pemerintah ke depan,” ungkapnya.

Sudirman, Anggota Komite IV, menyuarakan kekhawatiran terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh yang masih di bawah rata-rata nasional. “Apa kebijakan yang akan ditempuh pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi provinsi yang masih di bawah nasional?” tanyanya.

Senator NTB Achmad Sukisman Azmy, menegaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Evi Zainal Abidin dari Jawa Timur mendukung program makan bergizi gratis, “Peningkatan gizi anak-anak menjadi keharusan agar kita memiliki SDM yang lebih baik,” ujarnya.

Beberapa senator lainnya juga menekankan isu perpajakan yang berkeadilan serta pengawasan dana hibah Pilkada, seperti yang disampaikan Sukiryanto dari Kalimantan Barat dan Eva Susanti dari Sumatera Selatan. Rapat diakhiri dengan apresiasi dari I Made Mangku Pastika dari Bali atas kehadiran para pejabat terkait. (\*)

# Kemiskinan dan Pengangguran Tetap Jadi Perhatian Utama

Pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan stabilitas yang kuat meski dihadapkan pada berbagai tantangan global. Kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi perhatian utama.

**K**omite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin, 2 September 2024, di Komplek MPR RI/DPD RI/DPR RI Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025. Wakil Ketua Komite IV Elviana, mengungkapkan bahwa DPD RI mencermati sejumlah isu terkait kondisi sosial-ekonomi Indonesia yang terus membaik sejak 2020.

Sekretaris Utama BPS Imam Machdi, dalam pemaparannya juga mengakui adanya perbaikan ekonomi. Namun, ia menekankan bahwa kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi perhatian utama. “Tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2024 turun menjadi 9,03%, sementara pengangguran terbuka menurun menjadi 4,82% pada Februari 2024. Namun, disparitas antarwilayah masih menjadi tan-



Sekretaris Utama BPS Imam Machdi sedang menyampaikan paparannya di hadapan Komite IV DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Komite IV DPD RI dipimpin Ketuaanya Amang Syafrudin mengadakan rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pelaksanaan APBN 2024 dan RAPBN 2025. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

tangan,” jelasnya.

BPS juga mencatat laju inflasi tahunan hingga Agustus 2024 berada pada level 2,12%, dengan makanan dan minuman menjadi penyumbang utama inflasi. Imam Machdi menekankan perlunya kewaspadaan terhadap harga komoditas pangan yang sangat dipengaruhi oleh suplai.

Ketua Komite IV DPD RI KH. Amang Syafrudin, berharap BPS dapat terus menyediakan data akurat yang mendukung pengambilan kebijakan di tingkat daerah dan pusat. “Kami berharap data BPS dapat digunakan secara efektif dalam proses pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat,” katanya. (\*)



# Meresahkan, Lonjakan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KGB) di Indonesia kian marak. Sejumlah pihak, termasuk DPD RI merasa khawatir dengan lonjakan kasus yang mayoritas korbannya adalah perempuan.

Komite III DPD RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Senin (2/9/2024) untuk membahas peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Rapat ini melibatkan Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Lembaga Bantuan

Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Muslim M Yatim, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya kasus Kekerasan Berbasis Gender (KGB), yang mayoritas korbannya adalah perempuan.



Wakil Ketua Komite III DPD RI Muslim M Yatim bersama Ketua Komite III Hasan saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Selain melakukan inventarisasi data kasus KBG, kami juga ingin menyerap aspirasi dari Komnas Perempuan mengenai penanganan dan perlindungan korban serta efektivitas perundang-undangan seperti UU PK-DRT dan UU TPKS,” ujar Muslim M Yatim di Gedung DPD RI, Jakarta. Ia menegaskan pentingnya evaluasi efektivitas undang-undang dalam melindungi korban kekerasan.

Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri, menyatakan akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) untuk merumuskan langkah konkret mengatasi lonjakan kasus kekerasan.

“Kami akan membahas solusi dan langkah konkret dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat setiap tahunnya,” tegas Hasan Basri.

Anggota DPD RI asal Sumatera Selatan, Arniza Nilawati, menyoroti perlunya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ia mengatakan, “Diperlukan perlindungan hukum yang kuat atas kasus kekerasan terhadap pekerja perempuan. Namun hingga saat ini RUU PPRT belum juga diketok palu, sehingga kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga menjadi saling lempar tanggung jawab antar kementerian.”

Menanggapi hal ini,

Wakil Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Mariana Amiruddin, mengakui bahwa UU TPKS No.12 Tahun 2022 masih baru dan beberapa aparat penegak hukum belum sepenuhnya beradaptasi. “Beberapa kasus sudah menggunakan UU ini, namun masih banyak penegak hukum yang kembali menggunakan KUHP atau UU Perlindungan Anak. UU TPKS mengandung unsur pemulihan korban yang penting,” ujar Mariana. Koordinator Pelaksana Harian LBH APIK, Khotimun Susanti, menambahkan bahwa kekurangan dalam penerapan *restorative justice* dan keterlambatan perlindungan terhadap korban perlu segera ditangani.

(\*)



Foto bersama Pimpinan Komite IV DPD RI dengan Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



# Perlu Langkah Tegas Atasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

**K**omite III DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga pada Senin (2/9/2024) di Ruang Padjajaran DPD RI. Rapat ini bertujuan membahas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi di Indonesia, serta memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan tersebut.

Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Ia menegaskan perlunya langkah-langkah nyata untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif. “Banyaknya kasus kekerasan berbasis gender (KBG), secara tidak langsung menyiratkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum KBG terhadap perempuan,” ujarnya.

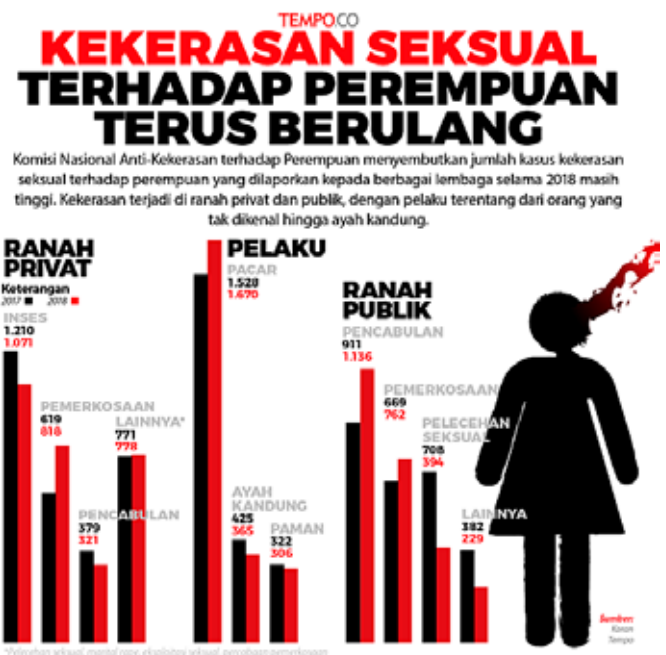
Menteri Bintang Puspayoga menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es di Indonesia. “Satu dari empat perempuan di Indonesia dengan rentang usia 15-64 tahun, pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan dan non pasangan selama hidup mereka,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa jumlah kasus yang dilaporkan hanya ribuan dari total jutaan korban yang ada.

Bintang juga menekankan pentingnya sinergi dalam penanganan kasus kekerasan. “Persoalan kekerasan di setiap daerah akan berbeda, sehingga dibutuhkan identifikasi masalah di tiap daerah dan peranan semua pihak,” jelas Bintang. Ia menegaskan perlunya aturan pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).

Dua Anggota Komite III DPD RI Fadhil Rahmi dan Arniza Nilawati, mengharapkan Kementerian PPPA dapat mendorong agar Komnas Perempuan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Arniza menyatakan, “Seandainya Komnas Perempuan hanya bertugas di pusat, sulit bagi mereka menjem-



Pimpinan Komite III DPD RI foto bersama dengan Menteri PPPA Bintang Puspayoga usai mengadakan rapat kerja di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



put bola persoalan yang ada di daerah.”

Komite III DPD RI mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian PPPA namun menekankan perlunya evaluasi dan peningkatan implementasi regulasi yang ada. Hasan Basri menutup rapat dengan harapan bahwa sinergi antara DPD RI, Kementerian PPPA, dan pihak terkait lainnya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih kuat dan konkret dalam menangani kekerasan. Rapat kerja ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. (\*)



# Mahasiswa Unand Kunjungi Kantor DPD RI Sumbar

Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan dari English Student Association (ESA) Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas pada Kamis, 5 September 2024. Sebanyak 30 mahasiswa mengikuti audiensi ini di ruang rapat kantor DPD RI, dengan tujuan mengenal lebih jauh fungsi dan peran lembaga negara tersebut.



**K**epala Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat Erdia

Nova, didampingi Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Andri Matovani, menjelaskan kepada para mahasiswa mengenai keberadaan kantor DPD RI di tiap provinsi, khususnya di Sumatera Barat. Ia juga memaparkan tugas pokok dan fungsi DPD RI serta peran anggota DPD dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pertemuan ini diwarnai dengan antusiasme mahasiswa yang dipimpin oleh Ketua ESA, Miftahul Ghanniyah. Mereka mengajukan be-

berapa pertanyaan, termasuk mengapa DPD RI kurang dikenal oleh masyarakat, program pengembangan budaya lokal, serta tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Beberapa pertanyaan bahkan diajukan dalam bahasa Inggris sebagai bagian dari pembelajaran mereka.

Menanggapi pertanyaan mahasiswa, Erdia Nova mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengenal DPD RI secara mendalam. “Kegiatan audiensi seperti ini sangat penting

untuk mengenalkan DPD RI kepada masyarakat, khususnya mahasiswa. DPD RI hanya mengusulkan Undang-Undang, sedangkan DPR yang memiliki wewenang untuk mengesahkannya,” jelasnya.

Di akhir acara, Erdia Nova menyampaikan apresiasinya atas kunjungan mahasiswa Universitas Andalas dan berharap melalui audiensi semacam ini, masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih memahami peran DPD RI sebagai Lembaga Tinggi Negara. (\*)

# Setjen DPD RI Gelar FKP Standar Pelayanan IT

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) melalui Bagian Pengelolaan Sistem Informasi (BPSI) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang standar pelayanan konektivitas jaringan intranet dan internet pada Jumat (13/9/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan layanan Teknologi Informasi (IT) di lingkungan Setjen DPD RI.



Suasana pembukaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) melalui Bagian Pengelolaan Sistem Informasi (BPSI). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**K**epala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Zulfikar Saifuddin, menekankan pentingnya orientasi digital dan percepatan pelayanan di lingkungan instansi. “Kita harus bekerja progresif, menghilangkan kesan birokrasi lamban, dan membudayakan kerja berbasis teknologi,” ujarnya.

Kepala Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Eko Prasetyo Nugroho, menyampaikan bahwa standar pelayanan akan menjadi acuan dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan terukur. “Kami

berkomitmen untuk terus berinovasi dan membangun komunikasi efektif dengan stakeholder,” katanya.

Dalam sesi diskusi, Kepala Subbagian Pemberitaan Budi Fitra Helmi menyoroti

pentingnya akses aplikasi helpdesk untuk staf Anggota DPD RI yang dinilai dapat mempercepat dukungan layanan. “Perlu dicarikan alternatif solusi dan disepakati oleh forum konsultasi publik ini bagaimana mekanisme yang pas, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah, Novri Roliansyah, menyampaikan beberapa kendala terkait aplikasi

kepegawaian dan absensi yang dihadapi di daerah.

Forum ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Standar Pelayanan oleh para *stakeholder* yang hadir. (\*)



**Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Zulfikar Saifuddin** (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta menyaksikan pertandingan tinju Daud Yordan melawan penantang-nya Hernan Leandro Carrizo, di GOR Terpadu Ayani, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (7/9/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Komite III DPD RI di bawah komando ketuanya Hasan Basri, mengadakan kunjungan ke arena PON XXI Aceh – Sumut di Medan untuk melihat sejumlah venue yang digunakan para atlet untuk berlaga. Ketua Komite III DPD RI sedang memberikan keterangan pers di salah satu arena PON, Selasa (10/9/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Selasa (10/9/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



# Pengawasan Dana Desa untuk Transformasi Ekonomi di Kaltara

Oleh:  
**Fernando Sinaga**

**S**aya kebetulan diundang sebagai narasumber dalam lokakarya Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) yang bertemakan “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” di Kantor Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (12/9/2024) lalu. Saya menyampaikan beberapa pokok pikiran tentang pengawasan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah terkait Desa.

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia memegang peranan krusial dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah terkait desa menjadi semakin penting untuk memastikan keuangan desa dikelola dengan akuntabilitas tinggi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui Komite IV telah menekankan pentingnya peningkatan anggaran dana desa yang lebih signifikan, dengan disertai



kebijakan berbasis kebutuhan dan karakteristik daerah, untuk mendorong otonomi desa.

Kenaikan anggaran desa diharapkan dapat memperkuat peran desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan kebijakan yang fleksibel dan berbasis kebutuhan lokal, pengelolaan dana desa harus diarahkan pada pembangunan yang efektif dan efisien, sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kondisi geografis masing-masing desa. Pada Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI awal September 2024, DPD RI telah menyampaikan rekomendasi terkait peningkatan anggaran dana desa sebagai bagian dari masukan untuk APBN 2025.

Namun, peningkatan

dana desa saja tidak cukup. Pengelolaan dana desa harus diprioritaskan berdasarkan strategi pemerintah yang sejalan dengan visi otonomi desa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, misalnya, memiliki program prioritas *quick win* yang menitikberatkan pada ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG). Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 harus mencerminkan tujuan-tujuan ini, sehingga program-program strategis tersebut dapat terwujud secara efektif di tingkat desa.

Salah satu sektor kunci yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana desa adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Saya, sebagai salah satu pimpinan Komite IV DPD RI, menyambut baik kebijakan Kementerian Desa PDTT yang akan memprioritaskan Dana Desa 2025 untuk pengembangan BUMDes. Pengembangan BUMDes diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan desa, serta memperkuat ekonomi lokal. Namun, keberhasilan ini bergantung pada pengelolaan yang baik dan penga-



wasan yang ketat.

Untuk menghindari potensi korupsi, DPD RI mendesak agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan yang lebih masif dan intensif terhadap BUMDes. Dana desa yang diprioritaskan untuk BUMDes harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kasus-kasus penyalahgunaan dana desa harus dicegah sejak awal dengan memperkuat sistem pengawasan yang terpadu antara BPKP, pemerintah desa, dan masyarakat.

Sinergi pengawasan antara BPKP dan DPD RI juga menjadi hal penting yang harus diperkuat mulai tahun 2025. Saya akan menyampaikannya kepada pimpinan DPD RI yang baru untuk membentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan BPKP dalam rangka memperkuat kerja sama pengawasan terhadap dana desa. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan tujuan pembangunan nasional yang dibiayai oleh dana desa dapat tercapai, dan kerugian negara akibat penyalahgunaan anggaran bisa diminimalisir.

Kalimantan Utara, sebagai salah satu provinsi yang mendapat alokasi dana desa cukup besar, telah menunjukkan progres positif dalam penyaluran dana desa. Menurut keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, penyaluran dana desa di

seluruh Indonesia sudah mencapai 100 persen. Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi. Di Kalimantan Utara sendiri, alokasi dana desa untuk tahun 2024 mencapai Rp399,95 miliar dari total alokasi belanja APBN sebesar Rp12,771 triliun.

Namun, meski dana desa telah tersalurkan 100 persen, pengawasan terhadap penggunaannya harus terus ditingkatkan. BPKP Kaltara harus memastikan bahwa setiap desa di Nunukan dan kabupaten lain menggunakan dana desa berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Musyawarah desa, sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat desa, harus menjadi dasar dalam menentukan penggunaan dana desa. Selain itu, pemerintah kabupaten bersama BPKP harus memberikan informasi terkait penggunaan dana desa secara berkala, baik melalui saluran online maupun offline.

Tantangan terbesar di Nunukan adalah lambannya perkembangan desa berstatus mandiri. Dari 232 desa di Nunukan, hanya 23 desa yang berstatus mandiri. Ini menjadi refleksi bahwa meskipun dana desa telah disalurkan, pengelolaannya belum sepenuhnya optimal. Dengan kenaikan dana desa pada tahun 2025 yang diperkirakan mencapai Rp71 triliun secara nasional, ada harapan besar agar desa-desa di Nunukan

dapat memanfaatkan dana tersebut dengan lebih baik, guna mempercepat pengembangan status desa mandiri.

Selain itu, pengelolaan dana desa yang efektif juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Nunukan masih cukup tinggi, yaitu 33,69 persen. Dana desa yang digunakan dengan tepat sasaran bisa menjadi alat penting dalam menurunkan angka kemiskinan, misalnya dengan program-program yang meningkatkan keterampilan warga dan menciptakan lapangan kerja baru di desa.

Pada akhirnya, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nunukan juga menjadi salah satu tujuan dari penggunaan dana desa yang lebih akuntabel. Saat ini, IPM Nunukan tergolong rendah, yaitu hanya 66,46 persen. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat dapat menjadi kunci untuk memperbaiki IPM di daerah ini.

Dengan sinergi yang kuat antara BPKP, DPD RI, dan pemerintah daerah, diharapkan pengelolaan dana desa di Nunukan dan wilayah lainnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

(\*/Penulis adalah Wakil Ketua Komite IV DPD RI)



## *Empat Kuliner Paling Dicari di Tangerang, Banten*

### *Four Most-Sought-After Cuisines in Tangerang, Banten*

#### 1 **Laksa Tangerang / Tangerang Laksa**

Laksa Tangerang adalah salah satu kuliner khas yang paling dicari oleh para pecinta makanan di kota ini. Hidangan berkuah santan yang gurih ini memiliki rasa yang kaya, terbuat dari rempah-rempah khas seperti serai, lengkuas, dan daun jeruk. Kuahnya yang kental disajikan dengan ketupat atau lontong, serta pelengkap seperti tauge, telur, dan potongan ayam atau udang. Kelezatan Laksa Tangerang tidak hanya dikenal oleh masyarakat lokal, tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung.



(Ilustrasi satu impresi)

*Tangerang Laksa (a sort of gravy soup) is one of the most-sought-after specific cuisines of the city by culinary adventurers. The savoury coconut-milk gravy dish has a rich taste made of typical spices such as lemongrass leaves, galangal and lime leaves. The gravy is thick, served with rice cake, with additional condiment such as bean sprouts, eggs, and shredded chicken or shrimp. The savory taste of Tangerang Laksa is not only known by the local community but also is an attraction to visiting tourists.*

#### 2 **Sate Bandeng / Bandeng Satay**

Sate Bandeng adalah sajian unik dari kota Tangerang yang wajib dicoba. Berbeda dengan sate pada umumnya, sate ini menggunakan ikan bandeng yang telah diolah sedemikian rupa sehingga durinya hilang, dan dagingnya dihaluskan bersama bumbu rempah, lalu dimasukkan kembali ke kulitnya. Setelah itu, ikan dipanggang hingga matang. Tekstur lembut ikan bandeng yang berpadu dengan cita rasa bumbu rempah menciptakan sensasi makan yang memuaskan, menjadikannya salah satu kuliner favorit di Tangerang.



(Foto Idm Times Banten)

*Bandeng satay is a unique dish of Tangerang city that is worthy to be tried. Unlike generally known satay, the satay is made from milkfish which has been processed in such a way to make it boneless whose fillet then is finely ground with spices to be later refilled to its skin. After that the fish is grilled until it is well-done. The soft texture of the milkfish combined with tasty spices creates a satisfying eating sensation, and has turned it into one of the most popular cuisine in Tangerang.*

### 3 Nasi Ulam Betawi / Betawi Rice Salad

Nasi Ulam Betawi di Tangerang juga menjadi buruan para pecinta kuliner. Meskipun berasal dari Betawi, hidangan ini sangat populer di Tangerang. Nasi ulam disajikan dengan beragam lauk seperti serundeng, telur, semur daging, dan ikan asin, dengan tambahan daun kemangi yang memberikan aroma segar. Rasa nasi yang gurih dengan campuran rempah-rempah dan lauk pendampingnya menjadikan nasi ulam sebagai pilihan sarapan atau makan siang yang mengenyangkan dan kaya rasa.



(Ilustrasi Fimela.com)

*Betawi rice salad in Tangerang is also targeted by food lovers. Despite its Betawi origin, the dish is very popular in Tangerang. The rice salad is served with various dishes such as serundeng (a kind of fried beef), eggs, beef stew, and salted fish, with additional basil leaves that produce fresh aroma. The savoury steamed rice mixed with mixture of spices and its accompanying dishes turns rice salad into the choice for fulfilling breakfast or lunch which is rich in flavor.*

### 4 Es Bunutin / Bunutin Ice

Es Bunutin adalah minuman segar yang menjadi andalan saat panas terik di Tangerang. Minuman tradisional ini terdiri dari campuran es serut dengan berbagai bahan seperti agar-agar, cincau, kelapa muda, dan potongan buah-buahan segar, lalu disiram dengan sirup manis. Sensasi se-garnya yang menghilangkan dahaga, ditambah dengan rasa manis yang pas, menjadikan Es Bunutin salah satu kuliner minuman yang paling dicari oleh warga lokal maupun wisatawan.



(Foto Pemko Tangerang)

*Bunutin Ice is a mainstay fresh beverage during hot sunny day in Tangerang. The traditional beverage is made of mixture of shredded ice with various ingredients such as jelly, grass-jelly, young coconut, and fresh fruit cuts and mixed with sweet syrup. With the thirst-quenching fresh sensation and appropriately right sweetness does Bunutin Ice become one of the most-sought-after beverages by both the local and tourists.*



# PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Mengucapkan Selamat



## HARI PALANG MERAH INDONESIA

17 September 2024



### MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

